



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : **BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**
UNIT KERJA : **ANGGOTA BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN DAN INVESTASI**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUDIRMAN SAAD**
2. Jabatan : **ANGGOTA BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN DAN INVESTASI**
3. NHK : **79913**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 7.277.950.000**

1. Tanah Seluas 230 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 172.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 470 m2/203 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.517.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/80 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 567.500.000
4. Tanah Seluas 2313 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.734.450.000
5. Tanah Seluas 233 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 174.750.000
6. Tanah Seluas 749 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 561.750.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/400 m2 di KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
8. Bangunan Seluas 39.15 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 423.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000



4. MOBIL, HONDA FRED Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 52.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 841.115.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.168.820.669

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 9.762.885.669

III. HUTANG Rp. 56.417.429

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.706.468.240

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.